PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
e. Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
f. Perangkat Daerah, adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB II
P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah, adalah unsur staf Pemerintah Daerah ;

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati ;

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Kabupaten ;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
    a. Asisten ;
    b. Bagian ;
    c. Sub Bagian ;
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah :
    a. Asisten Tata Pemerintahan ;
    b. Asisten Administrasi Pembangunan ;
    c. Asisten Administrasi.

(3) Asisten-Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Asisten Tata Pemerintahan

Pasal 7

Asisten Tata Pemerintahan membawahi :

a. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
   1. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;
   2. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
   3. Sub Bagian Kekayaan Desa/Kelurahan.
b. Bagian Organisasi terdiri dari :
   1. Sub Bagian Kelembagaan ;
   2. Sub Bagian Tata Laksana ;
   3. Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan ;
   4. Sub Bagian Kepegawaian Setda.
c. Bagian Hukum terdiri dari :
   1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
   2. Sub Bagian Batuan Hukum ;
   3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Pembangunan

Pasal 8

Asisten Administrasi Pembangunan membawahi :

a. Bagian Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari :
   1. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
   2. Sub Bagian Pengendalian.
b. Bagian Perekonomian terdiri dari :
   1. Sub Bagian Sarana Perekonomian ;
   2. Sub Bagian Produksi.
c. Bagian Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
   1. Sub Bagian Agama ;
   2. Sub Bagian Sosial.

Bagian Kelima
Asisten Administrasi

Pasal 9

Asisten Administrasi membawahi :

a. Bagian Keuangan terdiri dari :
   1. Sub Bagian Anggaran ;
   2. Sub Bagian Perbendaharaan ;
   3. Sub Bagian Kas Daerah ;
   4. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

b. Bagian Umum terdiri dari :
   1. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Sekretariat Daerah ;
   2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol ;
   3. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Distribusi ;
   4. Sub Bagian Pengadaan ;
   5. Sub Bagian Inventarisasi dan Pemeliharaan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Daerah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang masing, - masing berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah ;

(2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan ;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan ;

(4) Pembina terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD ;

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah ;

(3) Sekretaris DPRD diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;

(4) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 13

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

a. Fasilitas rapat anggota DPRD ;
b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD ;
c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 15

Sekretariat DPRD membawahi :

a. Bagian Umum terdiri dari :
   1. Sub Bagian Tata Usaha ;
   2. Sub Bagian Rumah Tangga ;
   3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri dari :
   1. Sub Bagian Rapat dan Risalah ;
   2. Sub Bagian Perundang-undangan ;
   3. Sub Bagian Dokumentasi dan Kehumasan.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Sekretariat Daerah berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;

(3) Setiap pimpinan unit kerja lingkungan Sekretariat Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 17

(1) Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan teknis administratif mengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekretaris Daerah ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Sekretariat DPRD berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;

(3) Setiap pimpinan unit kerja lingkungan Sekretariat DPRD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

(1) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;

(2) Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan sumber lain yang diperoleh secara sah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 3 Tahun 1992 tentang Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA TANGGAL 26 APRIL 2001 NOMOR 4 TAHUN 2001 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O

Drs. Ec. SALAM
Pembina Tingkat I
NIP 510027150

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tengtang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten perlu membentuk Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk dan menata kembali Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

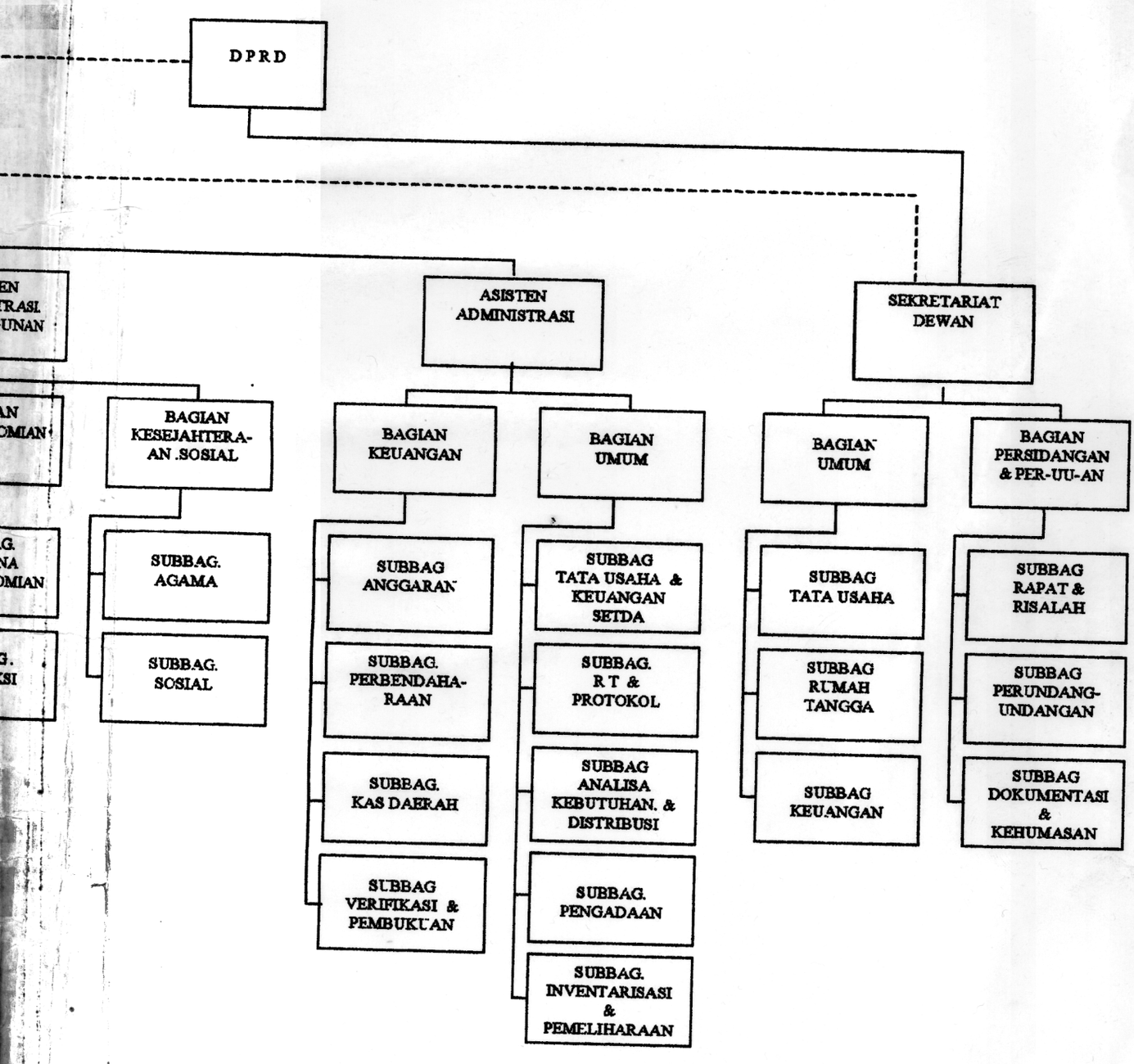
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 23 cukup jelas

----------000----------

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 4 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001

DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDOARJO



Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIA

